

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrie, Chaidir., 1993. *Bela Negara. Implementasi dan Pengembangannya*. UI Press. Jakarta.
- Horton, Paul B., dan Hunt, Chester L., 1993, *Sosiologi*, Jilid 1 edisi keenam, alih bahasa Aminuddin Ram, Tita Sobari, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ife, Jim., Tesoriero, Frank., 2008, *Alternatif Membangun Masyarakat di Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar Cetakan 1, Yogyakarta.
- Lemhannas, 1997, *Ketahanan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2003, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Munandar, Utami., 2004. “*Pengembangan Emosi dan Kreativitas*”. Rineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, Masri., dan Efendi, Sofyan., 1995, *Metode Penelitian Survei*, LPES, Jakarta.
- Salam, Moch Faisal., 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Soedarsono, Soemarno., 1997, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi., 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Syarif, Amiruddin., 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta Cet. 1 Jakarta.
- Tim Revisi, 2013, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy., 2000, *Manajemen Jasa*. Edisi Kedua. Andi offset, Yogyakarta.

Winardi, 1999, *Manajemen Personalia*, BPFE UGM, Yogyakarta.

W.J.S. Poerwadarminta., 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal dan Tesis:

Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, tanggal 28 Oktober 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 371 – 390.

Heru Sutarto, Purnomo, 2015, *Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Bagi Prajurit TNI AD dan Implikasinya terhadap Ketahanan Prajurit*, Tesis: Universitas Gajah Mada.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 3 Oktober 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 16 Oktober 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 5 April 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 16 Oktober 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 29 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 Tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 21 Mei 1973.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Diundangkan di Jakarta, pada Tanggal 12 Maret 2010.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/42/XI/2006 tanggal 27 November 2006 tentang Organisasi dan Tugas Hukum Kodam (Orgas Kumdam)

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/ 130/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/226/VII/ 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Buku Petunjuk Lapangan Bantuan Hukum TNI AD.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/362/VI/ 2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pidana.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/363/VI/ 2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan: 84-K/PM.III-12/AD/IV/ 2012 Tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan: 221-K/PM.III-12/AD/ XI/2012 Tanggal 18 Maret 2013.

Website:

<http://www.kodam5-brawijaya.mil.id/berita/detail/1745/term-of-reference--tor---diskusi-menekan-pelanggaran-prajurit--pada-apel-dansat-kodam-vbrw-ta-2016.html>.